

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Adanan Siregar. 2017. Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an).
- Alfano Ramadhan. 2021. Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No.1, hlm. 25-41.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor. 2019. Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KBBI Daring. Diakses tanggal 1 Desember 2021 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaand diakses tanggal 1 Desember, 2021, Pukul. 19.40>.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. St.Paul, MN, West Publishing, co., 2004, hlm. 259.
- Bambang Waluyo. 2014. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 2.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam pemberantasan Korupsi, (*Jurnal Keadilan: Vol.5 No. 1 Tahun 2011*), hal. 33
- Beridiansyah. 2017. Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi. *Jurnal Integritas*, Vol.3. No.2.
- Chairul Anwar Dan Adi Hermasyah. 2020. Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadaan Barang Dan Jasa (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh), Vol.4, No.4
- Cosmin Peonasu, "*Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment*", dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015, 2015, hal. 147.
- Carissa Byrne Hessick, "*Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?*", dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109, 2008, hal. 1125.
- Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Meneliti Hukum. *Jurnal Viat Justisia*, Vol. 8, No. 1.

- Endah Cahyani. 2022. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 3, No. 2.
- Fauzan. 2014. Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lembaga Pemerintahan (Suatu Tinjauan Analisis Preventif).
- Fazzan. 2015. Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Islam Futura, Vol.14, No. 2.
- Fransiska Adelina. 2019. Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No.1.
- Henni Muchtar. 2015. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Humanus, Vol.14, No.1.
- I Gusti Ketut Ariawan. 2013. Metode Penelitian Hukum Normatif. Jurnal Kertha Widya, Vol.1, No.1.
- Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto dan Tien Yustini. 2020. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Masalah-masalah Sosial I, Vol.11, No. 2.
- Jerry Indrawan, Anwar Ilmar dan Hermina Simanihuruk. 2020. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. Jurnal Transformative, Vol. 6 No. 2.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1.
- Lasmauli Noverita Simarmata. 2021. Korupsi Sekarang Dan Yang Akan Datang. Jurnal Dirgantara, Vol. 11, No. 2.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 186.
- Margaretha Yesicha Priscyllia. 2014. Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. Hlm. 1-13.
- Masrizal Afrialdo. 2016. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. Jurnal JOM, Vol. 3, No.2. hlm. 1-15.

- Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono. 2018. Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS. *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 1.
- Muhammad Sulthan Maulana, Cesar Rengganis dan Maudy Nurunnisa. 2021. Korupsi, Droit De Suit Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Indonesia Rich*, Vol.2, No.2.
- Mohammad Danial Dan Dadang Mashur. 2014. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 2, No. 3.
- Mukhlis, R. *Jurnal Ilmu Hukum*. Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. Vol.4, No.1.
- Mursalim (Dalam Soekanto).2017. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Al-Hikam*, Vol.1, No.3.
- Notoatmodjo . 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa Dan Lidia M. Mawikere. 2017. Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.12, No.2.
- Ridwan Arifin Oemara Syarief dan Devanda Prastiyo. 2018. Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18, No. 1, hlm. 1 – 13.
- RB. Soemanto, Sudarto, Sudarsana. 2014. Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. *Yustisia* Vol. 3 No. 1, hlm. 1-9.
- Rico Andi Wibowo. 2015. Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?). *Jurnal Integritas*, Vol. 1, No.1.
- Sabrina Dyah Nayabarani. 2017. Membangun Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Peningkatan Peran Ict Dalam Mereduksi Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47 No. 4.
- Titin Apriani. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Seorang Penyidik Kepolisian Terhadap Barang Bukti Yang Disita Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ganec Swara* Vol. 16, No.1.

Tri Wahyu Widiastuti. 2009. Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya. Jurnal Wacana Hukum, Vol. 3, No.2, hlm. 107-118.

Unti Ludigdo. 2018. Korupsi Di Perguruan Tinggi. Jurnal Transformative, Vol. 4, No. 1.

Undang-undang:

Undang-Undang Pasal 74 Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 2.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 3.

Internet:

<https://kbbi.web.id/korupsi> diakses tanggal 28 Juli 2022